



**RENCANA AKSI  
KEUANGAN  
BERKELANJUTAN (RAKB)  
TAHUN 2026**

**BANK  
Kota Blitar**

PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BLITAR

## **KATA PENGANTAR**

Sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) di Indonesia yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Perumda BPR Kota Blitar berupaya merespon kebijakan tersebut dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026 sebagai fondasi dan landasan strategik untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan.

Sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Perumda BPR Kota Blitar ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai lembaga perantara (intermediary institution) melalui dana yang dihimpun dalam bentuk DPK (Tabungan dan Deposito) dan kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit maka dalam hal membiayai debitur, Perumda BPR Kota Blitar berkewajiban menghindarkan diri dari mendanai kegiatan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan juga yang kontraproduktif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dalam keterkaitan positif ini (positive linkage), Perumda BPR Kota Blitar menyadari pentingnya isu pengelolaan Keuangan Berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip triple bottom line yaitu People (Sosial), Planet (Lingkungan) dan Profit (Ekonomi) dalam kegiatan usaha Bank dengan menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) atau ESG (Environmental, Social and Governance).

Perumda BPR Kota Blitar berkomitmen untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan dengan menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial. Konkritnya Perumda BPR Kota Blitar berkeinginan menjalankan operasional dan bisnis yang lebih bertanggung jawab dari aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk mendukung ekonomi berkelanjutan.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL LAPORAN</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	4
1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan .....	4
1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan .....	5
1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan .....	5
1.4. Program yang Akan Dilaksanakan Dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan .....	5
1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan .....	7
1.6. Seluruh Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan .....	7
<b>BAB II PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN</b> .....	9
2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan .....	9
2.2. Keterlibatan Pihak Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan .....	9
<b>BAB III FAKTOR PENENTU RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN</b> .....	10
3.1. Rencana Strategis Bank .....	10
3.2. Kapasitas Organisasi .....	11
3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis .....	13
3.4. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal .....	14
3.5. Strategi Komunikasi .....	14
3.6. Sistem Monitoring .....	14
3.7. Kebijakan Pemerintah .....	15
<b>BAB IV PRIORITAS DAN URAIAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN</b> .....	16
4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan. ....	16
<b>BAB V TINDAK LANJUT RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN</b> .....	18
5.1. Pegawai, Pejabat, Unit Kerja yang Bertanggung Jawab Terhadap Monitoring dan Evaluasi .....	18
5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan .....	18
5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan .....	18
5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Tercapai Tujuan yang Diinginkan .....	19
5.5. Penutup .....	21

## BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF

### 1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2026 merupakan implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang ketiga, dan dalam kesempatan ini juga masih belum tersedia data hasil penerapan Keuangan Berkelanjutan yang memadai, khususnya mengenai pelaksanaan sebagaimana yang direncanakan pada tahun 2025.

#### Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Uraian	Tahun 2025 (Nominal Dalam Jutaan Rupiah)	
<b>Produk yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan</b>		
a. Penghimpunan Dana	3 Rekening	Rp1.500.000.000
b. Penyaluran Dana	31 Rekening	Rp12.281.649.120
<b>Total Aset Produktif Pada Kegiatan Usaha Berkelanjutan</b>		
a. Total Kredit/Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Rp435.940.800	
b. Total Seluruh Kredit/Pembiayaan	Rp13.700.699.502	
<b>Persentase total kredit/pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank</b>	<b>3,18%</b>	
<b>Jumlah dan kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan</b>	<b>Rp435.940.800</b>	<b>NPL 0,00%</b>
a. Energi terbarukan	Nihil	NPL Nihil
b. Efisiensi energi	Nihil	NPL Nihil
c. Pencegahan dan pengendalian polusi	Nihil	NPL Nihil
d. Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
e. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	Nihil	NPL Nihil
f. Transportasi ramah lingkungan	Nihil	NPL Nihil
g. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	Nihil	NPL Nihil
h. Adaptasi perubahan iklim	Nihil	NPL Nihil
i. Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (Eco Efficient)	Nihil	NPL Nihil
j. Bangunan berwawasan lingkungan	Nihil	NPL Nihil

yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional atau internasional		
k. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	Nihil	NPL Nihil
l. Kegiatan UMKM	Rp435.940.800	NPL 0,00%

## 1.2. Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

### 1.2.1. Visi

Menjadikan Perumda BPR Kota Blitar sebagai BPR terbaik di wilayah Blitar Raya dan sebagai BUMD layanan keuangan terkemuka berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu kesemuanya mencapai kesejahteraan.

### 1.2.2. Misi

1. Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya.
2. Percepatan kinerja, sinergi dan transformasi bisnis berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang handal.
3. Mendorong pertumbuhan kredit yang wajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang terukur dan berkelanjutan.

## 1.3. Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Sejalan dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai, tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perumda BPR Kota Blitar yaitu : menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi utama yaitu menjalankan organisasi yang berbasis berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu kesemuanya mencapai kesejahteraan. Penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis, integrasi aspek sosial dan lingkungan hidup ke dalam pengelolaan risiko serta peningkatan pertumbuhan portofolio pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan hidup.

## 1.4. Program yang akan dilaksanakan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

### 1.4.1. Rencana Satu Tahun

No	Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Target dan Tujuan	Indikator Pencapaian
1	01 Des 2025 s/d 31 Jan 2026	Penyusunan SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan.	Memiliki SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan.	SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan tersebut disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
2	01 Jan 2026 s/d 28 Feb 2026	Penyelenggaraan sosialisasi tentang	Peningkatan awareness	Sosialisasi dilaksanakan

		konsep dasar Keuangan Berkelanjutan.	(penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan.	sebanyak 1 kali dalam setahun untuk seluruh pegawai, dan dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi RBB.
3	01 Mar 2026 s/d 31 Mar 2026	Pembuatan Surat Edaran / Memo Internal mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup.	Meningkatkan awareness tentang Keuangan Berkelanjutan.	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar dengan perilaku menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan.
4	01 Jun 2026 s/d 30 Jun 2026	Penggunaan wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan.
5	01 Jun 2026 s/d 30 Jun 2026	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Memastikan tersedianya penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/ atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan.
6	01 Jul 2026 s/d 31 Agt 2026	Meningkatkan akses keuangan terhadap sektor Pertanian	Pembiayaan pada sektor pertanian (urban farming).	Meningkatnya baki debit kredit sektor pertanian di Perumda BPR Kota Blitar dibanding tahun 2025.

#### 1.4.2. Rencana Lima Tahun

No	Tahun	Uraian dan Target Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1	2026	Penyusunan SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan. Memiliki SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan.	SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan tersebut disetujui oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
2	2026	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan. Peningkatan awareness (penyadartahuan) tentang Keuangan Berkelanjutan.	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun untuk seluruh pegawai, dan dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi RBB.
3	2026	Pembuatan Surat Edaran / Memo Internal mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup. Meningkatkan awareness tentang Keuangan Berkelanjutan.	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar dengan perilaku menjaga lingkungan dan tidak membuat kerusakan.
4	2026	Penggunaan wadah minuman yang ramah lingkungan Meminimalisir penggunaan wadah	Penurunan penggunaan air minum kemasan.

		minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	
5	2026	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Memastikan tersedianya penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ditunjuknya Unit Kerja yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan.
6	2026	Meningkatkan akses keuangan terhadap sektor Pertanian Pembiayaan pada sektor pertanian (urban farming).	Meningkatnya baki debit kredit sektor pertanian di Perumda BPR Kota Blitar dibanding tahun 2025.
7	2027	Memiliki Produk Keuangan Berkelanjutan Melakukan kajian-kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan memastikan produk dan/atau jasa keuangan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip usaha berkelanjutan.	Telah dilakukan kajian terkait produk pembiayaan usaha daur ulang kertas, plastik dan lainnya
8	2028	Pembelajaran terhadap Debitur Edukasi kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan.	Edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan.
9	2029	Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun sebelumnya	Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun sebelumnya
10	2030	Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun sebelumnya	Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun sebelumnya

### 1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

Pelaksanaan kegiatan aksi keuangan berkelanjutan membutuhkan dana yang bersumber dari internal Perumda BPR Kota Blitar. Dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab aktivitas / program kerja dengan melibatkan setiap organ dalam struktur organisasi.

### 1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

1. Direktur Bisnis menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan divisi terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Bagian Operasional mengelola pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan- kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

3. Bagian Pemasaran dengan menerbitkan atau mengembangkan produk/ jasa Keuangan Berkelanjutan serta mengelola pelaksanaan program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi tugasnya (pengembangan produk).
4. Staff Teknologi Informasi melakukan penyesuaian sistem teknologi & pelaporan Keuangan Berkelanjutan.
5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia & Umum melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan (mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan), dan melaksanakan efisiensi kegiatan operasional dan mengelola program aksi Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bidang tugasnya.
6. PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT PPPSPM, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan BPR. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko BPR (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh BPR

## **BAB II**

### **PROSES PENYUSUNAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN**

#### **2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan**

Rujukan yang digunakan sebagai acuan Perumda BPR Kota Blitar dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
2. Pedoman Teknis bagi Bank terkait Implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017.
3. Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang diterbitkan oleh OJK, baik Tahap I: 2015-2019 maupun Tahap II: 2021-2025.

#### **2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**

Dalam proses penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), Perumda BPR Kota Blitar tidak menggunakan pihak ketiga atau konsultan. Laporan RAKB ini disusun sendiri oleh internal BPR yaitu oleh Direktur Bisnis dengan didukung oleh keterlibatan unit kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Pengembangan Produk dan Jasa keuangan berkelanjutan yang melibatkan Divisi Kredit / Pemasaran dan Divisi Operasional
2. Pengembangan Kapasitas Internal yang melibatkan Divisi SDM dan Divisi Umum.
3. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Bagian Kredit / Pemasaran serta Operasional, TI, SDM & Umum, maupun Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
4. Langkah - langkah strategis, khususnya yang terkait dengan penentuan prioritas program rencana aksi keuangan berkelanjutan jangka pendek maupun jangka panjang, diarahkan oleh Direksi melalui persetujuan Dewan Pengawas.

### **BAB III**

## **FAKTOR PENENTU**

## **RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN**

### **3.1. Rencana Strategis Bank**

1. Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini, Perumda BPR Kota Blitar akan terus mengembangkan dan menyediakan produk- produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Blitar pada umumnya. Selain dari kredit utama Perumda BPR Kota Blitar yang pasarannya adalah pegawai negeri sipil daerah dan juga pengusaha UMKM, Perumda BPR Kota Blitar juga akan berupaya meningkatkan portofolio kredit guna membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut, Perumda BPR Kota Blitar akan melaksanakan pelatihan- pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh di kemudian hari.

Menyesuaikan dengan misi, Perumda BPR Kota Blitar akan fokus pada peningkatan laba dan selalu berupaya memperhatikan RAKB sesuai dengan arahan OJK.

Sesuai dengan visi menjadi BPR terbaik yang diperhitungkan keberadaannya di wilayah Blitar Raya serta peduli membantu kesemuanya mencapai kesejahteraan. Perumda BPR Kota Blitar mempunyai strategi sebagai berikut:

#### **a. Rencana Penghimpunan Dana:**

1. Membentuk lini organisasi dalam bidang funding di bawah koordinasi bagian pemasaran.
2. Perbaiki mutu produk dan pelayanan, terutama untuk mengakomodir keperluan Pemerintah Kota dalam penyaluran dana ke masyarakat.
3. Mengembangkan layanan transaksi non tunai.
4. Penetrasi pada segmen pasar dengan basis komunitas atau kelompok besar seperti sekolah, pesantren, maupun Lembaga berbasis masa lainnya.
- b. Peningkatan Portofolio Kredit pada segmen captive market yang terafiliasi dengan Pemerintah Kota Blitar, sebagai berikut:
  5. Kredit Guru Ngaji (Guru Agama)
  6. Kredit Proyek/Program khusus untuk mendukung program Pemkot Blitar
  7. Kredit ASN
  8. Kredit TPP
  9. Kredit PPPK
  10. Kredit Untuk Tenaga Medis
  11. Kredit untuk THL dan tenaga kontrak lainnya
  12. Kredit UMKM dan Pasar.
- c. Menyalurkan Kredit Pertanian.
- d. Secara bertahap meningkatkan portofolio kredit pada sektor UMKM.
- e. Meningkatkan kemitraan bisnis dengan internal Pemkot Blitar beserta aparaturnya.
- f. Memperluas segmen pasar dengan memanfaatkan celah pasar dan posisi BPR sebagai BUMD Pemkot Blitar.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bagian kredit sesuai kebutuhan.
- h. Menyempurnakan sistem manajemen dan sistem administrasi perkreditan.
- i. Pembuatan promosi audio maupun video.

2. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR. Penyelesaian kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) merupakan tantangan yang sering dihadapi oleh BPR. Kredit

bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat normatif (seperti halnya ketidaksesuaian antara kemampuan bayar debitur dan jumlah kredit yang diberikan) maupun fraud (penipuan atau tindak kecurangan oleh pihak debitur). Permasalahan ini perlu ditangani dengan hati-hati agar dampaknya tidak meluas, mengganggu kesehatan finansial, dan merugikan pemangku kepentingan. Untuk itu Perumda BPR Kota Blitar, merencanakan upaya penyelesaian kredit bermasalah, sebagai berikut.

1. Sinergi dengan Inspektorat Kota Blitar, Kejaksaan Negeri (DATUN), dan Kepolisian.
  2. Pengambilalihan agunan atau penghapus-bukuan, dan upaya perbaikan kualitas kredit.
  3. Upaya perbaikan intern, antara lain dengan meningkatkan kualitas SDM terutama bagian perkreditan, antara lain dengan cara mengikut sertakan dalam pelatihan di bidang kredit (inhouse maupun eksternal), meningkatkan kualitas analisa pemberian kredit, dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian.
  4. Upaya penagihan secara normatif, antara lain dengan meningkatkan intensitas atau frekuensi penagihan kredit dengan membentuk team penanganan kredit bermasalah, mengirimkan somasi/ peringatan, mengajukan gugatan untuk kategori permasalahan kredit yang relatif berat, dan melakukan upaya penjualan secara sukarela atau lelang agunan/jaminan kredit bermasalah di KPKNL.
  5. Upaya pengawasan ketat oleh Direksi agar penyelesaian Kredit bermasalah dapat berjalan dengan optimal.
  6. Membentuk team khusus/ team adhoc yang fokus pada penanganan kredit bermasalah.
3. Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR Strategi pemenuhan ketentuan BPR dilakukan dengan cara:
1. Melakukan evaluasi terhadap relevansi ketentuan eksis yang telah ada.
  2. Melakukan update terhadap ketentuan yang ada.
  3. Menyusun ketentuan-ketentuan yang belum dibakukan oleh perusahaan.
  4. Mensosialisasikan setiap adanya peraturan atau ketentuan yang baru atau perubahan ketentuan kepada segenap SDM yang ada.
  5. Selalu update dan dinamis terhadap dinamika perusahaan dalam kaitan dengan pihak internal maupun eksternal.

## 3.2. Kapasitas Organisasi

### 3.2.1. Kapasitas Organisasi

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing-masing, Perumda BPR Kota Blitar juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

#### Dewan Komisaris Bank

No	Nama	Jabatan
1	Mokhamad Sidik	Ketua Dewan Pengawas
2	Raden Agung Andokoputro	Anggota Dewan Pengawas

### Direksi Bank

No	Nama	Jabatan
1	Edy Prasetyo	Direktur Utama
2	Anang Winariyanto	Direktur

### Pejabat Eksekutif / Divisi / Unit / Satuan Kerja

No	Nama	Uraian Divisi / Unit / Satuan Kerja
1	Moh. Khairudin Nasution.	PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan PPPSPM.
2	Achmad Gofur Budianto.	PE Audit Intern (SPI).
3	Amalia Purwanda.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia & Umum.
4	Reni Yulia Susanti	Kepala Bagian Pemasaran.
5	Nicka Febriani	Pjs. Kepala Bagian Operasional.

### 3.2.2. Sumber Daya Manusia

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga- tenaga yang berkompeten pada bidang masing-masing PERUMDA BPR KOTA BLITAR juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

#### 1. Jumlah Komposisi Karyawan

#### Jumlah Komposisi Pegawai Bank Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	0
2	Pasca Sarjana (S2)	2
3	Sarjana (S1)	15
4	Sarjana Muda / Diploma	1
5	SMA Atau Sederajat	3
6	SMP Sederajat	0
7	SD Sederajat	0
<b>Total</b>		<b>21</b>

#### Jumlah Komposisi Karyawan Berdasarkan Gender

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	11
2	Perempuan	10
<b>Total</b>		<b>21</b>

## 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu aspek penting untuk mendukung kemajuan dan keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Mengingat, pengembangan SDM di BPR memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, tercapainya target dan kepuasan pelanggan. Terkait hal tersebut, Perumda BPR Kota Blitar melakukan langkah-langkah: a. senantiasa melakukan pendidikan dan pelatihan (training untuk pegawai, baik secara offline maupun online) agar SDM dapat mengikuti perkembangan yang ada. b. Pemberdayaan Karyawan (pemberian tanggung jawab untuk menangani permasalahan atau berperan dalam pengambilan keputusan). c. Motivasi dan insentif. d. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.

### 3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

#### 3.3.1. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan Perumda BPR Kota Blitar pada Triwulan III Tahun 2025 dan 2 (dua) tahun terakhir, adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

#### A. Kinerja Keuangan

(Dalam Juta Rupiah)

No	Indikator	2025 (TW III)	2024	2023
1	Total Aset	Rp26.274	Rp25.894	Rp24.298
2	Modal Inti	Rp10.108	Rp9.843	Rp9.706
3	Kredit Yang Diberikan	Rp13.701	Rp10.997	Rp6.700
4	Dana Pihak Ketiga	Rp15.811	Rp15.532	Rp13.875
5	Pendapatan Operasional	Rp2.788	Rp3.281	Rp2.256
6	Beban Operasional	Rp2.644	Rp2.755	Rp2.171
7	Laba Operasional	Rp65	Rp458	Rp101

#### B. Rasio Keuangan

No	Rasio	2025 (TW III)	2024	2023
1	Rasio KPMM	82,48%	84,07%	108,75%
2	NPL Gross	7,25%	8,37%	12,06%
3	NPL Net	3,01%	5,27%	5,38%
4	ROA	0,34%	2,13%	0,48%
5	NIM	10,85%	8,30%	7,54%
6	Rasio BOPO	94,83%	84,72%	96,22%
7	LDR	20,03%	82,63%	29,08%

3.3.2. Peningkatan Kapasitas Teknis Teknologi BPR merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa BPR dapat beroperasi secara efisien, aman, dan kompetitif dalam era digital saat ini. Adopsi teknologi tidak hanya dimaksudkan untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari tetapi juga memfasilitasi pengembangan produk dan layanan yang

lebih inovatif, serta memungkinkan BPR untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Peningkatan kapasitas teknis dan teknologi di BPR sangat penting untuk memperkuat daya saing, efisiensi operasional, dan pengembangan bisnis di masa depan. Karenanya peningkatan kapasitas teknis teknologi BPR senantiasa dijadikan perhatian utama, antara lain

dengan :

1. Penyediaan aplikasi perbankan / software berbasis teknologi digital
2. Infrastruktur Teknologi untuk Mendukung Aktivitas Operasional BPR dan bisnis di masa mendatang.
3. Manajemen risiko dan keamanan data.
4. Pelatihan dan Pengembangan SDM dalam Teknologi.

### **3.4 Kerjasama Dengan Pihak Eksternal**

Kerjasama dengan Pihak Eksternal dalam program pengembangan kapasitas BPR sangatlah penting dalam mendukung peningkatan kemampuan SDM BPR dalam berbagai aspek, seperti teknologi, manajemen, serta pengembangan produk dan layanan. Kolaborasi dengan pihak eksternal untuk melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan dari regulator, memungkinkan BPR untuk mengakses pengetahuan, teknologi, dan pengalaman yang tidak dimiliki secara internal, serta untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasionalnya.

### **3.5 Strategi Komunikasi**

Perumda BPR Kota Blitar berupaya menciptakan komunikasi yang baik guna mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, Perumda BPR Kota Blitar terus mengkomunikasikan agar aktivitas operasional lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif, di antaranya :

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas.
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan. Selanjutnya, Perumda BPR Kota Blitar akan memberikan literasi dan edukasi kepada konsumen (nasabah) khususnya debitur, agar memiliki kepedulian didalam menjalankan aktivitas usahanya terutama mengenai hal-hal yang menyangkut kelestarian lingkungan hidup.

### **3.6 Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi**

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan, antara lain:

1. Rapat Dewan Pengawas dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat bisnis yang rutin dilakukan secara berkala untuk memonitor kinerja pencapaian target pada seluruh unit kerja.
3. Rapat divisi yang dilaksanakan dapat dilaksanakan secara insidental dan/atau berkala oleh masing-masing divisi guna Membahas permasalahan bisnis dan operasional.

### 3.7 Kebijakan Pemerintah

Pelaksanaan RAKB mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.

### 3.8 Pendekatan Analisis Faktor Penentu

Pendekatan analisis faktor penentu dalam pembuatan RAKB dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk membantu Perumda BPR Kota Blitar dalam mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, dan menganalisa potensi yang dimiliki :

1. Strengths (Kekuatan) ☒ BPR memiliki cadangan likuiditas yang relatif besar dan memadai. ☒ BPR memiliki reputasi yang relatif baik dan memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi (terdapat basis nasabah yang loyal dan telah lama menjalin hubungan usaha dengan BPR). ☒ Tim manajemen BPR relatif berpengalaman dalam mengelola risiko operasional dan finansial, serta cenderung dapat memitigasi potensi masalah likuiditas dengan lebih baik. ☒ Demografi pegawai BPR didominasi oleh usia produktif, sehingga lebih dinamis, enerjik, memiliki semangat tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya guna memajukan BPR.
2. Weaknesses (Kelemahan) ☒ Keterbatasan Kuantitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas (Kompetensi) SDM. ☒ Produk dan layanan yang masih terbatas ☒ Sistem dan prosedur (pedoman) operasional yang masih dalam proses penyempurnaan
3. Opportunities (Peluang) ☒ Peluang Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan Lain / BPR Perbamide lainnya. ☒ Sinergi dengan mitra strategis perusahaan. ☒ Pertumbuhan UMKM yang baru disekitar Kota Blitar yang memungkinkan pertumbuhan atau terjadi peningkatan dalam permintaan kredit. ☒ Kebijakan Pemerintah Daerah yang fokus pada Sustainable Development Goals (SDGs)
4. Threats (Ancaman) ☒ Perubahan dalam kondisi ekonomi seperti resesi atau krisis keuangan, dapat menyebabkan penurunan dalam permintaan kredit, dan transaksi perbankan lainnya seperti angsuran kredit, dan setoran simpanan nasabah. ☒ Kebijakan moneter atau peraturan baru yang diterapkan oleh Pemerintah atau Otoritas yang bisa mempengaruhi aliran kas, seperti kewajiban cadangan wajib yang lebih tinggi, perubahan suku bunga, atau pembatasan tertentu dalam pemberian kredit. ☒ Ketidak siap terhadap ancaman siber atau yang tertinggal dalam hal teknologi digital yang dapat mengalami kebocoran data. ☒ Ekosistem ekonomi yang belum sepenuhnya mendukung bisnis keuangan yang berkelanjutan.

**BAB IV**  
**PRIORITAS DAN URAIAN**  
**RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN**

**4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/ atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.**

**a. Dasar Pemikiran**

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program- program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/ atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan pembenahan prosedur operasional.

**b. Kegiatan**

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep dasar Keuangan Berkelanjutan.	01 Jan 2026 s/d 28 Feb 2026	Dana dan Sumber Daya Manusia	Bagian Umum dan SDM, serta Kepatuhan
2	Penyusunan SOP Implementasi Keuangan Berkelanjutan.	01 Des 2025 s/ d 31 Jan 2026	Sumber Daya Manusia.	Bagian Kepatuhan.
3	Pembuatan Surat Edaran / Memo Internal mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup.	01 Mar 2026 s/ d 31 Mar 2026	Sumber Daya Manusia dan papan pengumuman.	Direksi.
4	Penggunaan wadah minuman yang ramah lingkungan	01 Jun 2026 s/d 30 Jun 2026	Sumber Daya Manusia.	Bagian SDM dan Umum.
5	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	01 Jun 2026 s/d 30 Jun 2026	Sumber Daya Manusia.	Direksi.
6	Meningkatkan akses keuangan terhadap sektor Pertanian	01 Jul 2026 s/d 31 Agt 2026	Dana dan Sumber Daya Manusia.	Kepala Bagian Pemasaran.

c. Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/ praktisi dalam implementasinya.

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Pelaksanaan evaluasi dilihat dari indikator dan timeline yang ditetapkan oleh divisi terkait.

e. Tantangan dan Rencana Kedepan

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

**BAB V**  
**TINDAK LANJUT**  
**RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN**

**5.1. Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi**

1. Pemantauan merupakan aktivitas penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan secara efektif.
2. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
3. Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Kepala Divisi (Kepala Bagian) terkait memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dari sisi kepatuhan dan aspek hukum, termasuk risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.
4. PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dalam fungsi Kepatuhan bertugas membantu memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, sedangkan dalam fungsi Manajemen Risiko bertugas membantu melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.

**5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**

Untuk memastikan efektifitas realisasi Rencana Keuangan berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diatarsebagai berikut:

**Penentuan Waktu Untuk Mengukur  
Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**

No	Aktivitas	Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan tahun berjalan	Triwulanan	Direksi beserta segenap divisi terkait.
2	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	Akhir November Tahun Berjalan	Direksi beserta seluruh jajarannya.
3	Laporan Keberlanjutan	Paling lambat akhir Mei Tahun berikutnya	Direksi dan PIC pelaporan yang ditunjuk.

**5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai dengan harapan dan timeline yang direncanakan, maka Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Terus berusaha memaksimalkan potensi dan sumber daya yang telah dimiliki
2. Terus mensosialisasikan aksi keuangan berkelanjutan sebagai komitmen BPR menjalankan instruksi dari Pemerintah.

1. Terus berusaha memaksimalkan potensi dan sumber daya yang telah dimiliki.
2. Terus mensosialisasikan aksi keuangan berkelanjutan sebagai komitmen BPR menjalankan instruksi dari Pemerintah.
3. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
4. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya. (jika ada).

#### **5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan**

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR Go Digital melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi sebagai berikut:

- a. Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa-masa yang akan datang.
- b. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan:
  1. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen.
  2. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
  3. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumber daya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.
- c. Pengembangan dan penyesuaian Produk Dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan:
  1. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
  2. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang

sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.

3. Perumda BPR Kota Blitar memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (cyber security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, Perumda BPR Kota Blitar akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.
4. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/ atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/ atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi Perumda BPR Kota Blitar dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
5. Perumda BPR Kota Blitar akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.

d. Penyaluran kredit berbasis lingkungan:

1. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
2. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
3. Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
4. Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal bank mengingat meski aturan sudah dibuat, tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran kredit minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.

e. Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktivitas operasional Bank. Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

f. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan:

1. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
2. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi-divisi yang berpotensi terkena risiko.
3. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

## **5.5. Penutup**

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PERUMDA BPR KOTA BLITAR ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.

**LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RAKB  
(RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan RAKB Tahun 2026  
PERUMDA BPR KOTA BLITAR**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK No. 51/ POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Laporan RAKB Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Kota Blitar, 21 November 2025

**PERUMDA BPR KOTA BLITAR**



**Edy Prasetyo**  
Direktur Utama

Disusun Oleh :



**Anang Winariyanto**  
Direktur

Disetujui Oleh :



**Mokhamad Sidik**  
Ketua Dewan Pengawas



**Raden Agung Andokoputro**  
Anggota Dewan Pengawas